

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia. Fokus pembangunan di desa, dilakukan melalui dana desa. Salah satu topik terkait desa tersebut adalah pengelolaan keuangan desa yang sangat penting sejak desa mulai menerima alokasi dana desa pada tahun 2015 (Amrullah, 2019). Dana desa merupakan salah satu usaha pemerintah dalam melakukan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia yang diwujudkan melalui dana desa yang dialokasikan khusus dalam APBN. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Tujuan dana desa yaitu untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan, menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan pelayanan di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Guna mencapai tujuan dana desa tersebut, maka pengelolaan dana desa harus dilakukan berdasar praktik pemerintahan yang baik. Asas pengelolaan dana desa sebagaimana yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban penggunaan dana desa, prinsip akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, hal ini bukan hanya semata untuk keperluan pelaporan bagi pemerintah daerah dan pusat namun

juga sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tidak langsung kepada masyarakat. Prinsip akuntabilitas juga memberikan gambaran terkait capaian kinerja pembangunan di desa yang menjadi rencana dan prioritas anggaran di desa (Yanto dan Aqfir, 2020).

Pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan peranggungjawaban. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan dana desa yang kini dilakukan oleh pemerintah desa belum tepat sasaran, karena pendapatan desa ada dua yaitu dana desa dan dana alokasi desa. Dana desa yaitu kewajiban dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBN sedangkan dana alokasi desa adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD. Pada dasarnya dana desa ataupun alokasi dana desa bisa digunakan selain melakukan pemerintahan dan pembinaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat

desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, dengan adanya transparansi maka setiap orang dapat memperoleh informasi tentang kinerja keuangan dana desa berdasarkan hasil-hasil yang telah di capai.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa tidak kalah pentingnya, transparansi menandakan bahwa dalam pengelolaannya, dana desa menjadi kekuatan pembangunan yang didalamnya terdapat keterbukaan baik dari segi anggaran dan penganggarnya maupun dari segi pelaksanaannya. Transparansi merupakan keterbukaan atas segala tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ataupun suatu perusahaan dimana adanya akses masyarakat setempat terhadap transparansi anggaran atau keterlibatan kepada masyarakat. Sedangkan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dimana pihak-pihak memiliki hak untuk meminta keterangan kinerja atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Informasi yang diperoleh melalui akuntabilitas dan transparansi keuangan nantinya bertujuan agar segala keputusan dalam kinerja pengelolaan keuangan dana desa bisa mencapai hasil yang diharapkan. Apabila tidak tercapainya target dalam memperoleh hasil atas keluaran yang telah dilakukan, bisa diambil kebijakan atau keputusan dalam pencapaian periode berikutnya. Oleh karena itu, dapat diketahui sejauh mana transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan dana desa dalam program kinerja desa kepada masyarakat

desa sesuai dengan ketentuan, khususnya Desa Poreang Kecamatan Tana Lili di Kabupaten Luwu Utara.

Kebijakan yang ditetapkan bermaksud agar pemerintah desa dapat memperoleh hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Penggunaan anggaran dana Desa Poreang Kecamatan Tana Lili di Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan cukup baik atau tidak. Kerena berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa anggaran yang dikelola telah mencapai target yang diharapkan terhadap program kerja yang telah direncanakan sebelumnya dapat direalisasikan sepenuhnya melalui anggaran yang diperoleh

Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Poreang Kecamatan Tana Lili di Kabupaten Luwu Utara.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari pembahasan yang di uraikan dari latar belakang di atas maka di peroleh rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan dana desa Poreang Kecamatan Tana Lili di Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaiman pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa Poreang Kecamatan Tana Lili di Kabupaten Luwu Utara?
3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan dana desa Poreang Kecamatan Tana Lili di Kabupaten Luwu Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini ialah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan dana Desa Poreang Kecamatan Tana lili di Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana Desa Poreang Kecamatan Tana Lili di Kabupaten Luwu Utara.
3. Untuk mengetahui Pengaruh transparansi dan akuntabilits terhadap kinerja Pengelolaan dana Desa Poreang Kecamatan Tana Lili di Kabupaten Luwu Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan mahasiswa ataupun masyarakat mengenai kinerja pengelolaan dana desa sudah transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada semua pihak, baik kepada masyarakat dan pemerintah desa mengenai kinerja pengelolaan desa agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam musyawarah.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasa Penelitian

Kinerja pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kinerja yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan transparan kinerja kepada masyarakat untuk memperoleh akses informasi. Kualitas kinerja pengelolaan dana desa yang baik sangat penting agar mencapai hasil yang

diharapkan yang nantinya digunakan sebagai bahan ukur dalam menilai hasil yang diperoleh pemerintah desa.

Batasan masalah dilakukan agar penelitian berfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga penelitian ini tidak meluas dan menyimpang. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini hanya berfokus mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa porenag kecamatan tana lili di Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenaan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan sebuah teori yang menjelaskan hubungan keagenan antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dengan pihak yang mengurus dan mengendalikan penggunaan sumber daya ekonomis tersebut (*agent*). Teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang didasarkan oleh suatu perjanjian antara para pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Hubungan agensi merupakan hubungan antara (*agent*) dalam hal ini adalah pengelola dana desa dengan (*principal*) dalam hal ini adalah masyarakat. Dalam teori keagenan akan terdapat perselisihan antara kepentingan *principal* dengan kepentingan *agent*. Oleh karena itu, diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sehingga kepentingan masyarakat dapat diwujudkan. Teori keagenan memiliki beberapa permasalahan diantaranya adanya biaya tambahan yang menjadi permasalahan bagi kedua belah pihak serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak *principal* (Suwarno, 2019).

Pada Pemerintahan Daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan, pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah Pemerintah dan *agents* dalam hal ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya. Teori keagenan ini digunakan untuk mengawasi dan mengontrol aliran dana yang diperoleh dari pemerintah pusat yang diserahkan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, perlunya teori keagenaa

(*Agency Theory*) tersebut yaitu untuk mengawasi pemerintah desa dalam mengelola dan melaporkan dana desa tersebut.

2.1.2 Transparansi

(Mardiosmo, 2018) Transparansi merupakan berasal dari kata *transparency* adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan desa pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga terwujud pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparansi memberikan arti anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses kinerja pengelolaan dana desa karena menyangkut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi (Setiawan dan N, 2019).

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Prinsip transparansi ialah adanya sistem keterbukaan yang jelas dan mudah dipahami dari kinerja pemerintah desa. (Mardiosmo, 2018) Prinsip transparansi yaitu:

1. Keputusan diambil dan ditegakan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
2. Terdapat akses publik terhadap semua informasi yang tidak diklasifikasikan sebagai rahasia oleh peraturan perundang-undangan (seperti untuk melindungi privasi atau memastikan keadilan prosedur pengadaan).
3. Informasi mengenai keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan hasilnya disediakan untuk publik melalui berbagai media sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengikuti dan berkontribusi terhadap pekerjaan pemerintah tersebut.

(Ana dan Ga, 2021) indikator yang dapat mengukur transparansi yaitu:

1. Keterbukaan, yaitu membuka diri kepada pihak-pihak yang membutuhkan akses informasi terkait.
2. Keterlibatan Masyarakat, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan tertentu yang dalam pencapaian kepentingan bersama.
3. Mudah dipahami, yaitu dapat menyampaikan informasi dengan baik atau jelas serta dapat bekerjasama dengan orang lain.

2.1.3 Akuntabilitas

(Mardiasmo, 2018) mendefinisikan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan. Sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab.

Akuntabilitas dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang telah dipercayakan sebagai pelaksanaan kewajiban kepala desa dalam rangka pencapaian tujuan desa. Akuntabilitas diharapkan mampu memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat. Kepercayaan inilah yang akan mengurangi tingkat penyimpangan dana desa sehingga masyarakat desa dapat diberdayakan menjadi masyarakat mandiri dan pada akhirnya menjadi desa mandiri (Arfiansyah, 2020).

Prinsip akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, hal ini bukan semata hanya untuk keperluan pelaporan bagi pemerintah daerah dan pusat, namun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tidak langsung kepada masyarakat (Yanto dan Aqhir, 2020). Prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan adalah prinsip yang menjamin bahwa pemerintah bertanggungjawab atas serangkaian program yang berada di bawahnya. Terlaksananya prinsip akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Arfiansyah, 2019). (Mardiosmo, 2018) Prinsip Akuntabilitas yaitu:

1. Semua pengambilan keputusan, baik kolektif maupun individu, bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil.
2. Keputusan dilaporkan, dijelaskan, dan dapat diberikan sanksi.
3. Terdapat langkah-langkah efektif untuk menghindari dan memperbaiki meladministrasi serta tindakan pemerintah daerah yang melanggar hak sipil.

(Sweetenia et al., 2019) Indikator dalam mengukur tingkat akuntabilitas yaitu:

1. Ketepatan waktu, yaitu tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat di butuhkan sebelum informasi tidak mempengaruhi suatu keputusan.
2. Pertanggungjawaban kinerja penyajian, yaitu kewajiban memberikan penjelasan atau jawaban yang terjadi atas kerugian yang ditimbulkan.
3. Penyajian laporan keuangan, yaitu penyajian dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas.

2.1.4 Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Kinerja aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan sekaligus penyelenggara pemerintahan desa yang mencakup kemampuan dan sarana prasarana merupakan salah satu aspek yang sangat penting (Amin, 2019).

Desa memiliki hak, wewenang, dan kewajiban dalam menjalankan semua sistem organisasi di pemerintahan desa baik dari segi peraturan hukum, pengelolaan keuangan, dan aset desa serta meningkatkan sumber daya manusianya. Terkait pengelolaan keuangan desa yang mana pelaksanaannya akan bergantung kepada kinerja perangkat desa dalam mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan. Kinerja pada instansi pemerintah termasuk pemerintahan desa

kini cukup menarik perhatian dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi.

(Raharjo, 2020) Penggunaan dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Penggunaan dana desa mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.

Menurut Menteri dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terkait pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa serta dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Ni'mah, 2019). Pengelolaan kekayaan milik desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa. (Setyawan dan N, 2019) dalam pelaksanaan Kinerja Pemerintahan Desa masih diperlukan beberapa aturan pelaksana unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa yaitu:

1. Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional.
3. Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi dan output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.

Prinsip penggunaan dana desa adalah dana yang diperuntukkan bagi setiap desa dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. (Kurniawan dan Wea, 2021) prinsip-prinsip penggunaan dana desa yaitu:

1. Keadilan, yaitu mengutamakan hak atau kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa adanya membeda-bedakan ras, gender, status sosial, kebangsaan, warna kulit etnis, dan agama.
2. Kebutuhan Prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan sebuah desa yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, untuk desa yang lebih membutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Tipologi desa, yaitu prioritas pengalokasian dana desa mempertimbangkan keadaan dan karakteristik geografis dari sebuah desa, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

(Soleh dan rochmanja, 2012) dalam (Astuti, 2020) indikator dalam

pengukuran kinerja yaitu:

1. Pelaksanaa kegiatan, yaitu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan guna mencapai tujuan program yang diharapkan.
2. Perencanaan kinerja, yaitu proses penyusunan rencana keinerja sebagai sasaran program yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.
3. Penatausahaan, yaitu kegiatan yang meliputi pembukuan dan pelaporan sesuai dengan perundang-undangan.

2.1.5 Dana Desa

(Bawono, 2019) Dana desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. (Hulu et al., 2018) dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

(Raharjo, 2020) dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan/wali kota. Tujuan dana desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Hulu et al., 2018).

Sumber-sumber pendapatan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain

Pendapatan asli desa.

2. Bagi hasil pajak daerah dan etribusi daerah kabupaten atau kota.
3. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
4. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota.
5. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota.
6. Dana hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang akan menjadi refrensi dari penelitian ini. Di bawah ini beberapa penelitian yang akan di angkat sebagai sumber untuk melakukan penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian>Nama Penelitian/Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Putra Adi Kurniawan	Transparansi (X1) Akuntabilitas (X2) Pengelolaan Keuangan desa (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

	(2019)		
2	<p>Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Ait Novatiani, R. Wedi Rusmawan Kusumah dan Diandra Pepi Vabiani (2019)</p>	<p>Transparansi (X1) Akuntabilitas (X2) Kinerja Instansi Pemerintah (Y)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas di SKPD Kabupaten Bandung Barat serta pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat baik secara parsial maupun secara simultan.</p>
3	<p>Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo</p>	<p>Transparansi (X1) Akuntabilitas (X2) Pengelolaan Dana Desa (Y)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berhubungan positif dengan pengelolaan dana desa, transparansi tidak berhubungan positif dengan pengelolaan</p>

	Kabupaten Tanggamus) Afrijal (2018)		dana desa, dan secara parsial transparansi dan akuntabilitas mempunyai hubungan yang positif terhadap pengelolaan dana desa.
4	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen organisasi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan momunu Kabupaten Buol Kumala Dewi, M. Ikbal dan A. Fadli Moh (2019)	Akuntabilitas (X1) Transparansi (X2) Komitmen organisasi (X3) Pengelolaan Dana Desa (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan komitmen organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
5	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Sistem Pengelolaan Dana	Kualitas SDM (X1) Pemanfaatan Teknologi (X2) Sistem Pengelolaan Dana Desa (X3)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan Sistem pengelolaan dana desa berpengaruh

	Desa serta Dampak Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Deli Serdang Arfah Lubis (2020)	Kinerja Pemerintahan Desa (Y)	positif terhadap kinerja Pemerintah desa.
6	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Made Yoga Darma Putra dan Ni Ketut Rasmini (2019)	Akuntabilitas (X1) Transparansi (X3) Partisipasi masyarakat (X3) Efektivitas pengelolaan dana desa (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, berpengaruh positif pada efektifitas pengelolaan dana desa.
7	Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Sistem Keuangan Desa (X1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

	Mufti Arief Arfiansyah (2020)		
8	Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa atas Pengelolaan Keuangan Desa Wisata (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kecamatan Banjar) Ketut Teddy Wisastrawan, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Nyoman Putra Yasa (2020)	Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (X1) Kebijakan Desa (X2) Kelembagaan Desa (X3) Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.
9	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan	Akuntabilitas (X1) Transparansi (X2) Efektivitas Pengelolaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan, transparansi

	Alokasi Dana Desa Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman (Lara Aryanti, 2022)	Alokasi Dana Desa (Y)	berpengaruh signifikan, dan a akuntabilitas dan Transparansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
10	Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah (Dito Aditia Darma Nasution, 2018)	Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) Akuntabilitas (X2) Transparansi (X3) Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)	Hasil penelitian bahwa pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi, berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah.

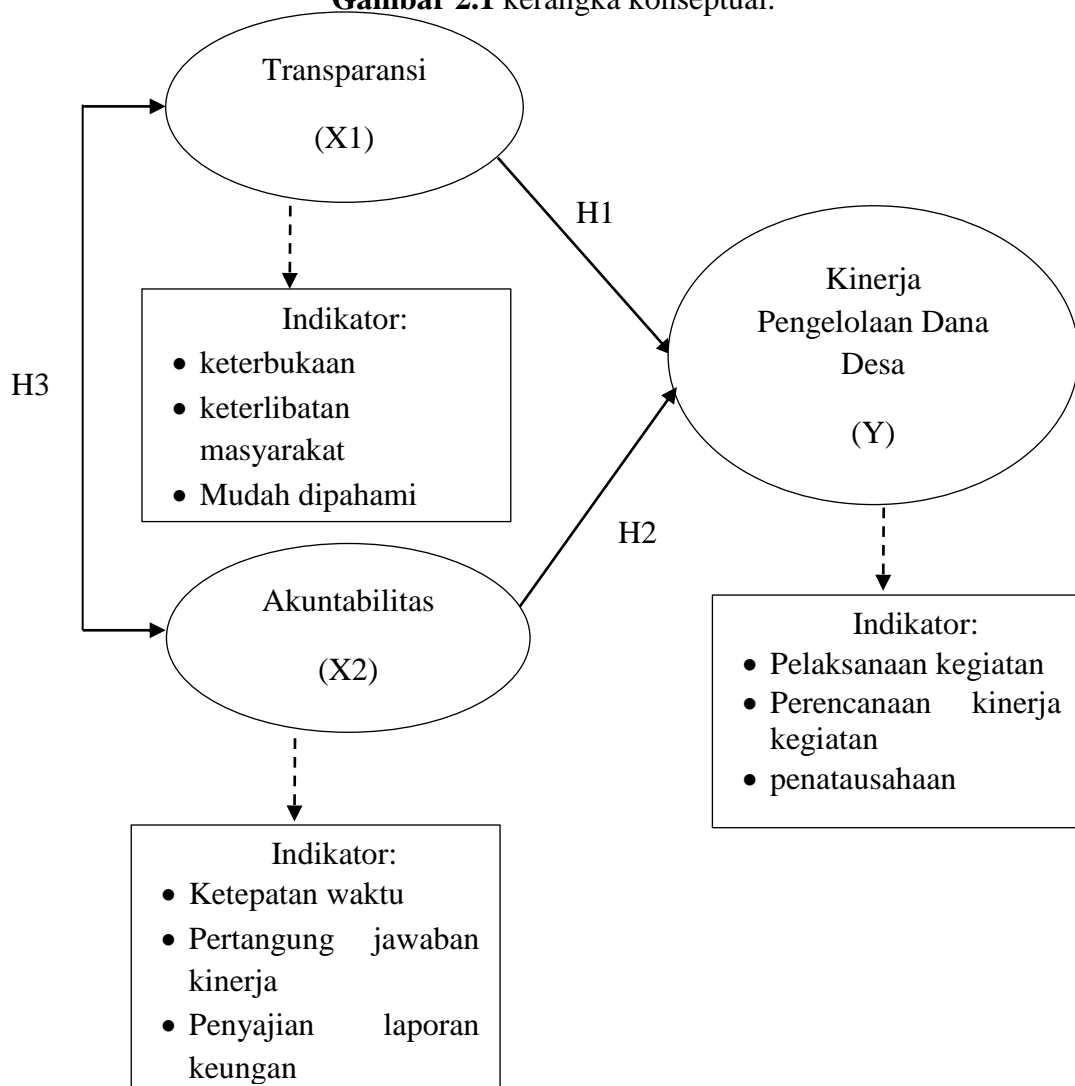
2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pemilihan aspek-aspek yang berdasarkan dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Kemudian di bentuk dalam bentuk bangunan dalam merumuskan tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas


terhadap kinerja pengelolaan keuangan dana desa.

Melalui transparansi dapat menyediakan informasi yang memadai diberikan secara keterbukaan, keterlibatan masyarakat, dan mudah dipahami terhadap kinerja keuangan dana desa, kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan melalui akuntabilitas dapat menjalankan tujuan-tujuan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan penyajian laporan keuangan, pertanggungjawaban kinerja, dan ketepatan waktu program kinerja pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, dengan adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap program kinerja maka akan memberikan peningkatan kinerja pemerintah desa.

Gambar 2.1 kerangka konseptual.



Keterangan:

 : Variabel Penelitian.

 : Garis Variabel Penelitian.

 : Indikator Variabel Penelitian.

 : Garis Variabel Indikator Penelitian.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori dari uraian di atas. Maka hipotesis yang akan diteliti yaitu pengaruh transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan dana desa poreang kecamatan tana lili di kabupaten luwu utara ialah:

H1= Diduga bahwa transparansi (X_1) berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa yang merupakan variabel (Y).

H2 = Diduga bahwa akuntabilitas (X_2) berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa (Y).

H3 =Diduga bahwa transparansi (X_1) dan akuntabilitas (X_2) berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa (Y).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan memberikan gambaran masa sekarang dan dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggambarkan secara sistematis fakta-fakta tentang transparansi, akuntabilitas dan kinerja pengelolaan dana desa poreang kecamatan tana lili di kabupaten luwu utara yang akan menjadi objek dari penelitian. Variabel independen (Bebas) yaitu Transparansi (X_1), dan Akuntunbilitas (X_2) sedangkan variabel dependen (Terikat) yaitu Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y). Penelitian ini, nantinya akan menggunakan angka-angka sebagai ukuran objek penelitian.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan ini, tempat penelitian terletak di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan, mulai dari bulan Februari sampai bulan April 2023.

3.3 Populasi dan Sampel

Salah satu bagian dalam desain penelitian ini ialah menentukan populasi dan sampel penelitian. Penentuan populasi dan sampel penelitian menjadi sangat penting. Karena hasil penelitian akan mengambil kesimpulan secara luas (generalisasi hasil penelitian). Ketepatan dan keakuratan dalam menentukan populasi dan sampel penelitian akan memberikan bobot dengan kualitas hasil dari penelitian.

3.3.1 Populasi

(Sugiyono, 2016) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek-obyek dan benda alam yang lain. Populasi dalam penelitian ini yang berhubungan dengan kinerja pengelolaan dana desa yaitu Perangkat Desa, Kepala Desa dan Masyarakat yang telah ditentukan peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di desa poreang pada Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

3.3.2 Sampel

(Sugiyono, 2013) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini karena jumlah populasi mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis, maka penelitian menggunakan teknik *stratified random sampling*. Teknik stratified random sampling adalah teknik penentuan sampel yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional, terkait dengan kinerja pengelolaan dana desa yang ada di balai desa dan untuk ketentuan kriteria responden berdasarkan pihak yang terkait berhubungan secara langsung dengan kinerja dana desa di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan teknik yang digunakan peneliti akan mengambil sampel sebanyak 101 responden.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian informasi yang digunakan adalah informasi yang

bersifat kuantitatif karena dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya.

3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data Primer. Data Primer data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utamanya atau investigasi lapangan yang diperoleh dari observasi dan informasi melalui wawancara yang ada di kuesioner yang disampaikan langsung kepada responden untuk menjawabnya yang berhubungan dengan penelitian.

3.4.2 Sumber Data

Data kuantitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang diamati. Data tersebut sebagai bahan atau dasar dalam menentukan isi, Bahasa, sistematika, item dalam instrument penelitian. Sumber data penelitian ini adalah subjek data di peroleh melalui observasi dan wawancara yang ada di kuesioner di antaranya:

1. Kepala Desa.
2. Perangkat Desa.
3. Masyarakat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan cara investigasi lapangan, observasi, wawancara yang terdapat dalam kuesioner atau angket, dan skala pengukuran likert yang disampaikan langsung dari Desa Poreang Kecamatan Tana Lili di Kabupaten Luwu Utara.

3.5.1 Penelitian Lapangan

1. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan meninjau langsung Desa Poreang Kecamatan Tana Lili di Kabupaten Luwu Utara.
2. Wawancara, dimana pertanyaan yang diberikan kepada responden memberikan pertanyaan-pertanyaan beserta pilihan jawaban kepada responden dengan pertanyaan yang ada di kuesioner meninjau secara langsung Desa Poreang Kecamatan Tana Lili di Kabupaten Luwu Utara.
3. Kuesioner (Angket), merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan tertulis kepada responden untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada masyarakat desa dan perangkat Desa Poreang Kecamatan Tana Lili di Kabupaten Luwu Utara.

3.5.2 Skala Pengukuran Likert

Skala pengukuran likert adalah skala untuk melengkapi angket yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian atau titik tolak penyusunan item-item instrumen yang berbentuk pertanyaan atau pernyataan dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju, yaitu:

Tabel 3.1 skala pengukuran likert

Jawaban	Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2

Sangat Tidak Setuju (STS)	1
---------------------------	---

3.6 Defenisi Operasional Variabel

3.6.1 Variabel Bebas atau Independen (X)

(Sugiyono, 2011) Variabel Independen biasa juga disebut sebagai variabel *stimulus, predictor, antecedent*. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1. Transparansi (X_1)

Transparansi berarti keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa Poreang serta memberikan informasi kinerja pengelolaan dana desa yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat di desa poreang kecamatan tana lili memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah sehingga mudah di pahami oleh masyarakat.

(Ana dan Ga, 2021) Indikator dalam rangka mengukur dimensi transparansi masyarakat khususnya dalam kinerja pengelolaan dana desa dapat dilihat melalui 3 indikator sebagai berikut:

- 1) Keterbukaan.
- 2) Keterlibatan Masyarakat.
- 3) Mudah dipahami.

2. Akuntabilitas (X_2)

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa poreang di kecamatan tana lili dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai penyajian laporan keuangan kinerja pemerintah Desa Poreang dalam ketepatan waktu mengambil keputusan sebelum mempengaruhi pengambilan keputusan.

(Sweetenia et al., 2019) Indikator dalam rangka mengukur dimensi Akuntabilitas masyarakat khususnya dalam kinerja pengelolaan dana desa dapat dilihat melalui 3 indikator sebagai berikut:

- 1) Ketepatan waktu.
- 2) Pertanggungjawaban kinerja.
- 3) Penyajian laporan.

3.6.2 Variabel Terikat atau Dependen (Y)

Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Kinerja pengelolaan dana desa adalah kinerja kepala desa poreang yang dibantu oleh perangkat desa poreang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang pelaksanaannya bergantung kepada semua sistem organisasi di pemerintahan desa poreang, baik dari segi rencana kinerja kegiatan peraturan hukum, pengelolaan keuangan, dan aset desa serta meningkatkan sumber daya manusia kinerja perangkat desa dalam mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan. Penatausahaan kinerja pada instansi pemerintah termasuk pemerintahan desa poreang di kecamatan tana lili kini

cukup menarik perhatian dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat desa poreang terhadap penyelenggaraan administrasi publik.

(Soleh dan Rochmanja, 2012) dalam (Astuti, 2021) Indikator dalam rangka mengukur dimensi kinerja pengelolaan dana desa dapat dilihat melalui 3 indikator sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan kegiatan.
- 2) Perencanaan kinerja kegiatan.
- 3) Penatausahaan.

3.7 Instrumen Penelitian

Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan tabel frekuensi dan deskripsi data yang dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk *numeric* tanpa bermaksud menarik kesimpulan. Hasil urain tersebut akan menggambarkan pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa Poreang Kecamatan Tana Lili di Kabupaten Luwu Utara.

3.7.1 Uji Validasi

Validasi adalah ukuran seberapa efektif dan valid suatu alat ukur atau penelitian untuk memberikan hasil yang konsisten dengan tujuannya. Pengujian ini dilakukan untuk apakah kuesioner tersebut valid untuk dibagikan kepada responden. Kreteria ditentukan dengan melihat kolerasi dengan tingkat signifikansi jika nilainya sig dan $it < 0,05$ maka pertanyaan angket dinyatakan valid (ghozali, 2018).

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban

responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengukur variabel transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pengelolaan dana desa. Uji reliabilitas ini diukur dengan menggunakan alat bantu aplikasi SPSS. Uji reliabilitas berbantuan pencarian dapat menggunakan metode *Cronbach alpha* pada setiap variabel, dengan kriteria yang menunjukkan suatu dimensi dikatakan reliabilitas jika nilai *Cronbach alpha* $> 0,60$. Pengukuran reabilitas dapat dilakukan dengan cara menghitung r_{hitung} dengan r_{tabel} , jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dapat dikatakan *reliable*, sebaliknya jika r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} tidak dapat dikatakan *reliable* (Ghozali, 2018).

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Analisis Regresi Linear Berganda

(Sugiyono, 2012) Analisis regresi linear berganda yaitu regresi linear dimana sebuah variabel terikat (Y) dihubungkan dengan dua atau satu variabel bebas (X). Dimana pengaruh Transparansi (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y) Desa Poreang Kecamatan Tana Lili di Kabupaten Luwu Utara. Adapun rumus yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Kinerja Pengeloaan Dana Desa.

a : Konstanta.

b_1 : Koefesien Regresi.

X_1 : Transparansi.

b_2 : Variabel Independen.

X_2 : Akuntabilitas.

e : standar eror.

3.8.2 Uji Statistik t

(Sugiyono, 2016) Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah:

$$n = \frac{rs\sqrt{n-2}}{rs\sqrt{1-rs^2}}$$

Keterangan:

n = Jumlah data.

r = Koefisien Korelasi.

Langkah-langkah uji hipotesis:

$H_0: t_s < 0$: Menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara kepuasan kerja dan keterlibatan kerja dengan kinerja karyawan.

$H_1: t_s > 0$: Menunjukkan terdapat Pengaruh antara kepuasan kerja dan keterlibatan kerja dengan kinerja karyawan.

Kriteria keputusannya yaitu:

1. Jika t hitung $>$ t tabel, dan $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika t hitung $<$ t tabel, dan $\text{sig} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
3. Taraf signifikan = 5%
4. Derajat kebebasan (df) = $n - 2$

3.8.3 Uji F

(Sugiyono, 2016) Uji F digunakan untuk menentukan apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik atau apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah:

$$F_{hitung} = \frac{R^2(k-1)}{(1-R^2)N-k}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinisasi.

N = Banyaknya Sampel.

K = Banyaknya Prameter/koefisien regresi plus konstanta.

Kreteria Pengujian:

1. Apabila nilai $F_{hitung} < T_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya semua koefisien regresi secara bersama-sama tidak signifikan pada taraf signifikan 5%.
2. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya semua koefisien regresi secara bersama-sama signifikan pada taraf 5%.

3.8.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Nilai R^2 ini terletak antara 0 dan 1. Bila nilai R^2 mendekati 0, berarti sedikit sekali variasi variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Jika nilai R^2 bergerak mendekati 1 berarti semakin besar variasi variabel dependen yang dapat di terangkan oleh variabel independen jika ternyata dalam perhitungan nilai

R^2 sama dengan 0 maka ini menunjukkan bahwa variabel dependen tidak bisa dijelaskan oleh variabel indepen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Poreang adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara dan Tana Lili adalah sebuah kecamatan yang sebelumnya merupakan Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Bone-Bone yang dimekarkan pada tanggal 5 Januari 2012. Desa Poreang merupakan salah satu Desa dari 10 desa yang terdapat di Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara.

Luas wilayah Desa Poreang adalah 13,59 km², yang terdiri dari tiga yaitu, Dusun Kuluri, Dusun Poreang, Dusun Tanete, dengan 3 Kepala Dusun dan 9 RT. Daerah ini memiliki iklim tropis yang terdiri dari dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan

Jumlah penduduk di desa poreang yaitu 2,830 jiwa, dan berdasarkan jenis kelamin di desa poreang yaitu laki-laki 1.436 jiwa dan perempuan 1.396 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 862 KK. Berdasarkan agama yang dianut warga desa poreang ada dua yaitu Islam 2.266 jiwa dan Kristen 560 Jiwa.

4.1.2 Visi dan Misi Desa Poreang

Visi Misi Kepala Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Tahun 2021-2027

1. Visi

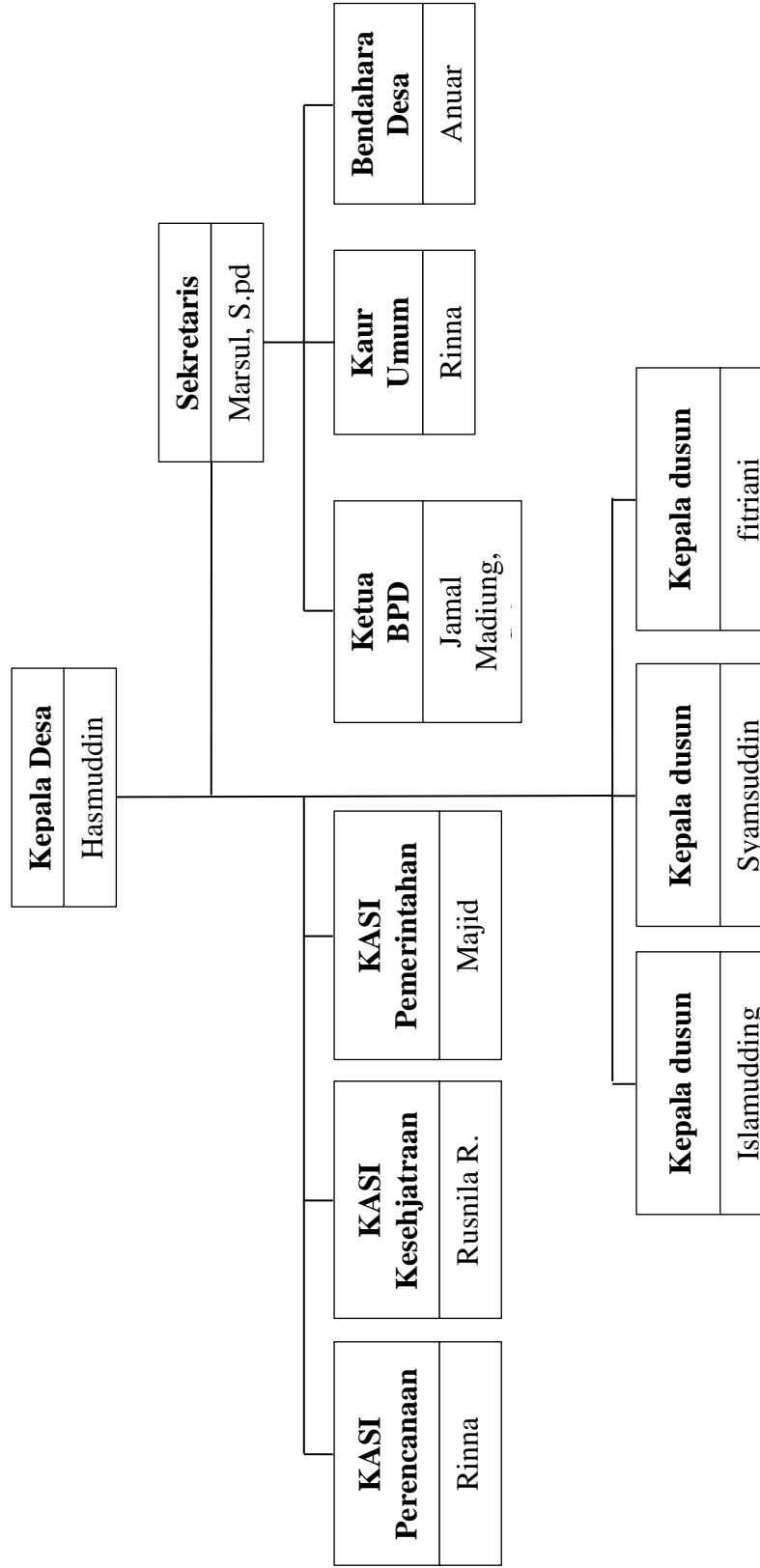
“Mewujudkan tata kelola pemerintahan dana yang baik dan bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih mandiri serta berahlak mulia”.

2. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan secara efektif, Efisien dan Bermartabat sesuai tuntutan kebutuhan Masyarakat.
- 2) Meningkatkan Infrastruktur yang berdampak terhadap perekonomian Masyarakat desa. Meningkatkan sektor pertanian, Pendidikan dan Kesehatan.
- 3) Meningkatkan sektor pertanian, Pendidikan dan Kesehatan.

4.1.3 Sturuktur Organisasi Desa Poreang

Gambar 4.1.3 Struktur Organisasi Desa Poreang



4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Transparansi

Tabel 4.1 data indikator transparansi

Item pernyataan	Jawaban					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	4.00
X1.1	0	0	7	64	30	4.22
X1.2	0	0	8	74	19	4.17
X1.3	0	0	18	71	12	3.94
X1.4	0	0	12	69	20	4.09
X1.5	0	0	5	58	38	4.33
Jumlah						4.15

Sumber data primer tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.1 yang menunjukkan hasil dari 101 responden yang diteliti. Pada pernyataan pertama, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang, jawaban tidak setuju 0 orang, jawaban netral 7 orang, jawaban setuju 64 orang, dan jawaban sangat setuju 30 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “setuju” bahwa kinerja pengelolaan dana desa dipublikasi secara terbuka oleh masyarakat.

Pada pernyataan kedua, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang, jawaban tidak setuju 0 orang, jawaban netral 8 orang, jawaban setuju 74 orang, dan jawaban sangat setuju 19 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “setuju” bahwa adanya keterlibatan masyarakat dalam laporan kinerja pengelolaan dana desa.

Pada pernyataan ketiga, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang, Jawaban tidak setuju 0 orang, jawaban netral 18 orang, jawaban

setuju 71 orang, dan jawaban sangat setuju 12 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “setuju” bahwa informasi tentang sumber permodalan disampaikan kepada publik.

Pada pernyataan keempat, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang, jawaban tidak setuju 0 orang, jawaban netral 12 orang, jawaban setuju 69 orang, dan jawaban sangat setuju 20 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “setuju” bahwa informasi tentang kinerja keuangan dana desa disampaikan secara jujur.

Pada pernyataan kelima, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang, jawaban tidak setuju 0 orang, jawaban netral 5 orang, jawaban setuju 58 orang, dan jawaban sangat setuju 38 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “setuju” bahwa masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana.

4.2.2 Akuntabilitas

Tabel 4.2 data indikator Akuntabilitas

Item pernyataan	Jawaban					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	0	0	7	60	34	4,00
X2.1	0	0	7	60	34	4.27
X2.2	0	0	11	66	24	4.13
X2.3	0	0	7	71	23	4.16
X2.4	0	0	5	65	31	4.26
X2.5	0	0	3	57	41	4.38
Jumlah						4.24

Sumber data primer tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.2 yang menunjukkan hasil dari 101 responden yang

diteliti. Pada pernyataan pertama, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang, jawaban tidak setuju 0 orang, jawaban netral 7 orang, jawaban setuju 60 orang, dan jawaban sangat setuju 34 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “setuju” bahwa penyelesaian laporan kinerja keuangan tepat waktu.

Pada pernyataan kedua, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang, jawaban tidak setuju 0 orang, jawaban netral 11 orang, jawaban setuju 66 orang, dan jawaban sangat setuju 24 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “setuju” bahwa beberapa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh aturan yang berlaku.

Pada pernyataan ketiga, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang, Jawaban tidak setuju 0 orang, jawaban netral 7 orang, jawaban setuju 71 orang, dan jawaban sangat setuju 23 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “setuju” bahwa laporan keuangan yang kami hasilkan telah disajikan secara jujur dan wajar.

Pada pernyataan keempat, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang, jawaban tidak setuju 0 orang, jawaban netral 5 orang, jawaban setuju 65 orang, dan jawaban sangat setuju 31 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “setuju” bahwa laporan pengelolaan pertanggungjawaban kinerja dibuat sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.

Pada pernyataan kelima, responden yang memilih jawaban sangat tidak

setuju 0 orang, Jawaban tidak setuju 0 orang, jawaban netral 3 orang, jawaban setuju 57 orang, dan jawaban sangat setuju 41 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “setuju” bahwa tahapan pengelolaan anggaran melibatkan semua unsur pengurus.

4.2.3 Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Tabel 4.3 data indikator Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Item pernyataan	Jawaban					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	4.00
Y1	0	0	3	63	35	4.32
Y2	0	0	5	65	31	4.26
Y3	0	0	2	61	38	4.36
Jumlah						4.31

Sumber data Primer tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.3 yang menunjukkan hasil dari 101 responden yang diteliti. Pada pernyataan pertama, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang, jawaban tidak setuju 0 orang, jawaban netral 3 orang, jawaban setuju 63 orang, dan jawaban sangat setuju 35 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “setuju” bahwa pelaksanaan kegiatan kinerja berdasarkan prinsip hemat dan tidak mewah.

Pada pernyataan kedua, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang, Jawaban tidak setuju 0 orang, jawaban netral 5 orang, jawaban setuju 65 orang, dan jawaban sangat setuju 31 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “setuju” bahwa perencanaan kinerja kegiatan didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku.

Pada pernyataan ketiga, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang, Jawaban tidak setuju 0 orang, jawaban netral 2 orang, jawaban setuju 61 orang, dan jawaban sangat setuju 38 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “setuju” bahwa pelaksanaan program-program dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

4.3 Deskripsi Data/Responden

Penelitian ini dilakukan untuk menguji transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

Data dalam penelitian ini adalah jenis data kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Berdasarkan kuesioner yang disebar oleh peneliti kepada Perangkat Desa, Kepala Desa, dan Masyarakat Desa Poreang Kecamatan Tana Lili di Kabupaten Luwu Utara, maka penjelasan dari karakteristik responden tersebut adalah sebagai berikut.

4.3.1 Responden Penelitian

Tabel 4.4 Responden Penelitian

No	Keterangan	Jumlah kuesioner	Presentase
1	Kuesioner yang disebar	101	100%
2	Kuesioner yang kembali	101	100%
3	Kuesioner yang tidak kembali	0	0
4	Kuesioner yang dapat diolah	101	100%

Sumber data Primer tahun 2023

Berdasarkan table 4.4 sebanyak 101 kuesioner yang dibagikan dan jumlah yang kembali 101 dalam artian 100% responden mengisi kuesioner yang telah

dibagikan.

4.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun deskripsi data responden keseluruhan Desa Poreang (Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat) diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Responden berdasarkan jenis kelamin Penelitian

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Pria	55	54%
2	Wanita	46	46%
	Total	101	100%

Sumber data Primer tahun 2023

Berdasarkan pada tabel di atas responden yang ikut berpartisipasi pada penelitian ini dengan klasifikasi jenis kelamin yaitu pria sebanyak 55 orang dengan persentase 54%, dan wanita sebanyak 46 orang dengan persentase 46%.

4.3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Adapun deskripsi data responden keseluruhan Desa Poreang (Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat) diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.6 karakteristik responden berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	<20 Tahun	13	13%
2	21-30 Tahun	35	35%
3	31-40 Tahun	26	26%
4	>41 Tahun	27	27%
	Total	101	100%

Sumber data Primer tahun 2023

Berdasarkan keterangan tabel di atas memperlihatkan responden yang ikut berpartisipasi pada penelitian ini dengan klasifikasi umur yaitu <20 tahun

sebanyak 13 orang dengan persentase 13%, 21-30 tahun sebanyak 35 orang dengan persentase 35%, 31-40 tahun sebanyak orang dengan persentase 26%, dan >41 tahun sebanyak 27 orang dengan persentase 27%.

4.3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun deskripsi data responden keseluruhan Desa Poreang (Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat) diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.7 karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD	23	23%
2	SMP	27	27%
3	SMA	36	36%
4	D3	2	2%
5	S1	7	7%
6	Lain-Lain	6	6%
	Jumlah	101	100%

Sumber data Primer tahun 2023

Berdasarkan pada tabel di atas responden yang ikut berpartisipasi pada penelitian ini dengan klasifikasi pendidikan yaitu SD sebanyak 23 orang dengan persentase 23%, SMP sebanyak 27 orang dengan persentase 27%, SMA sebanyak 36 orang dengan presentase 36%, D3 sebanyak 2 orang dengan presentase 2%, S1 sebanyak 7 orang dengan presentase 7%, dan Lain-lain sebanyak 6 dengan presentase 6%.

4.4 Uji Instrumen

4.4.1 Uji Validitas

Jika nilai variabel adalah r hitung $>$ r tabel, maka variabel tersebut

dinyatakan valid. Dapat dilihat dari representasi validitas masing-masing variabel yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.8 Uji Validitas

No	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
----	------------	----------	---------	------------

Transparansi

1	X1.1	0,572	0,195	Valid
2	X1.2	0,659	0,195	Valid
3	X1.3	0,334	0,195	Valid
4	X1.4	0,521	0,195	Valid
5	X1.5	0,703	0,195	Valid

Akuntabilitas

1	X2.1	0,685	0,195	Valid
2	X2.2	0,705	0,195	Valid
3	X2.3	0,552	0,195	Valid
4	X2.4	0,637	0,195	Valid
5	X2.5	0,720	0,195	Valid

Kinerja Pengelolaan Dana Desa

1	Y1.1	0,775	0,195	Valid
2	Y1.2	0,810	0,195	Valid
3	Y1.3	0,727	0,195	Valid

Sumber: data hasil olahan SPSS Ver.20, 2023

Dari tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dari variabel yaitu, Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y). Nilai korelasi di bandingkan dengan nilai r tabel, pada tingkat signifikan 0,05 dengan (n) = 101, maka didapat r tabel sebesar 0,195. Hasil uji diatas di dapatkan r hitung > r tabel sehingga dapat dinyatakan bahwa data tersebut valid.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengukur variabel akuntabilitas, transparansi dan kinerja pengelolaan dana desa. Pada pengujian reliabilitas data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *Cronbach alpha* dengan kriteria yang menunjukkan suatu dimensi dikatakan reliabilitas jika nilai *Cronbach alpa* > 0,60 maka dapat dikatakan *reliable*. Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap penelitian ini yaitu pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9 Uji Reliabilitas Transparansi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.618	5

Sumber: Data hasil olahan SPSS Ver.20, 2023

Tabel 4.10 Uji Reliabilitas Akuntabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.678	5

Sumber: Data hasil olahan SPSS Ver.20, 2023

Tabel 4.11 Uji Reliabilitas Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.660	3

Sumber: data hasil olahan SPSS Ver.20, 2023

Tabel 4.12 Rekapitulasi Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach,s	Batas Reliabilitas	Keterangan
Transparansi (X1)	0.618	0.60	Reliabel

Akuntabilitas (X2)	0.678	0.60	Reliabel
Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.660	0.60	Reliabel

Sumber: data hasil olahan SPSS Ver.20, 2023

Dari tabel tersebut di ketahui bahwa koefisien reliabilitas variabel transparansi 5 pernyataan sebesar 0.618, akuntabilitas 5 pernyataan 0.678, dan kinerja pengelolaan dana desa 3 pernyataan 0.660, hal ini menunjukkan bahwa semua koefisien reliabilitas $> 0,60$ maka di nyatakan *reliable*.

4.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

1. Uji t

Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh antara transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Tabel 4.13 Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.249	.996		.250	.803
1					
Transparansi	.251	.075	.320	3.335	.001
Akuntabilitas	.353	.064	.527	5.493	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Sumber Output SPSS Ver.20, 2023

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan tentang hasil pengujian parsial (

uji t) antara variabel bebas dan variabel terikat menunjukkan bahwa:

- 1) Hipotesis yang pertama diketahui untuk variabel Transparansi (X_1) terhadap variabel Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y), menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $3.335 > t_{tabel}$ sebesar 1.660 dan nilai probabilitas sebesar $0.001 < 0.05$. Karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} serta memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai standar sig. sehingga transparansi berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kinerja pengelolaan dana desa.
- 2) Hipotesis yang kedua diketahui untuk variabel Akuntabilitas (X_2) terhadap variabel kinerja pengelolaan dana desa (Y), menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $5.493 > t_{tabel}$ sebesar 1.660 dan nilai probabilitas sebesar $0.000 < 0.05$. Karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} serta memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai standar sig. sehingga akuntabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kinerja pengelolaan dana desa.

Berdasarkan tabel 4.13 maka diperoleh sebuah persamaan regresi linear berganda, sebagaimana persamaan regresi linear berganda yaitu $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$, maka jika dimasukkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0.249 + 0.251X_1 + 0.353X_2$$

Diketahui bahwa dari hasil persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Y = Kinerja Pengelolaan Dana Desa.

X_1 = Transparansi.

X_2 = Akuntabilitas.

a = 0.249 apabila transparansi, dan akuntabilitas dalam keadaan konstanta atau 0 maka kinerja pengelolaan dana desa nilainya sebesar 0.249.

b_1 = 0.251 adalah besarnya koefisien Regresi X_1 (Transparansi) yang berarti setiap peningkatan X_1 sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0.251. Jika variabel transparansi meningkat maka Kinerja Pengelolaan Dana Desa akan meningkat dan memiliki arah hubungan positif.

b_2 = 0.353 adalah besarnya koefisien Regresi X_2 (Akuntabilitas) yang berarti setiap peningkatan X_2 sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0.353. Jika variabel transparansi meningkat maka Kinerja Pengelolaan Dana Desa akan meningkat dan memiliki arah hubungan positif.

2. Uji F

Pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau terikat.

Tabel 4.14 Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	96.698	2	48.349	88.043	.000 ^b
Residual	53.817	98	.549		
Total	150.515	100			

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

Sumber Output SPSS Ver.20, 2023

Dari tabel tersebut nilai signifikan $0.000 < 0.05$ dan nilai F_{hitung} 88.043 $> F_{tabel}$ 3.09 sehingga dapat di simpulkan bahwa H_1 diterima H_0 ditolak yaitu dalam penelitian ini secara simultan terdapat pengaruh signifikan transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

3. Uji Kofesien Determinasi (R^2)

Uji kofesien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Besarnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjelaskan kinerja pengelolaan dana desa dilihat dari hasil berikut.

Tabel 4.15 Uji Kofesien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.802 ^a	.642	.635	.741

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variabel: Kinerja Pengelolaan Dana Des

Sumber Output SPSS Ver.20, 2023

Berdasarkan data diatas diketahui R Square sebesar 0.642. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X_1 dan X_2 secara simultan terhadap

Y adalah sebesar 64.2% dan sisanya 35.8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 101 Responden, untuk memberikan informasi terkait pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa hasil pernyataan angket yang disebar untuk 101 responden dinyatakan valid karena $r_{hitung} > t_{tabel}$ semua. Kemudian hasil reabilitas pada penelitian ini pun reliabel yaitu dibuktikan dengan semua koefisien lebih besar dari 0.60 maka semua pernyataan dinyatakan *reliable*.

Uji R (Koefisien Determinasi) pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan dana desa ini dapat diketahui dari nilai R Square sebesar 0.642 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 64.2% dan sisanya 35.8% lainnya dipengaruhi oleh faktor yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hasil analisis regresi berganda di ketahui bahwa $Y = 0.249 + 0.251X_1 + 0.353X_2$ dengan nilai konstanta sebesar 0.249. Hasil analisis uji F (uji signifikan simultan) diketahui bahwa ada pengaruh antara simultan antara variabel X_1 dan X_2 terhadap Y dengan nilai sig $0.000 < 0.05$ dengan nilai $F_{hitung} 88.043 > F_{tabel} 3.09$. Hasil analisis uji t berdasarkan hipotesis yang pertama diketahui untuk variabel Transparansi (X_1) $t_{hitung} = 3.335 > t_{tabel} 1.660$ dengan signifikan $0,001 < 0.05$ artinya transparansi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pengelolaan dana desa. Sedangkan hipotesis yang kedua untuk Akuntabilitas Transparansi (X_2) $t_{hitung} =$

$5.493 > t_{\text{tabel}} 1.660$ dengan signifikan $0.000 < 0.05$ artinya akuntabilitas terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

4.5.1 Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengelolaan data kuantitatif dalam penelitian ini, maka didapatkan hasil temuan yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Dengan adanya hasil pernyataan tersebut maka pertanyaan permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dibuktikan dan hal ini sesuai dan konsisten dengan hipotesis yang dimukakan pada bab sebelumnya yaitu transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2006).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra Adi Kurniawan, 2019) dengan judul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Peran Perangkat terhadap Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

4.5.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengelolaan data kuantitatif dalam penelitian ini, maka

didapatkan hasil temuan yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Dengan adanya hasil pernyataan tersebut maka pertanyaan permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dibuktikan dan hal ini sesuai dan konsisten dengan hipotesis yang dimukakan pada bab sebelumnya yaitu akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Sebagaimana telah diuraikan bahwa akuntabilitas dalam pemerintah desa diungkapkan melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban terhadap apa yang seharusnya dipertanggungjawabkan, berdasarkan atas hal apa yang dilakukan dan juga membandingkan hal yang sebetulnya dilakukan. Sehingga pelaksanaan suatu kegiatan dapat menjangapi suatu tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini didukung dengan berbagai teori yang dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tanggung jawab pengelolaan dana desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin baik juga. Begitupun sebaliknya, jika pengelolaan dana desa rendah maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan tidak baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Afrijal, 2018) dilakukan, dengan judul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus) terhadap Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

4.5.3 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian data kuantitatif dalam penelitian ini, maka didapatkan hasil temuan yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Dengan adanya hasil pernyataan tersebut maka pernyataan permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dibuktikan dan hal ini sesuai dengan konsisten dengan hipotesis yang dikemukakan pada bab sebelumnya yaitu transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Sebagaimana telah diuraikan bahwa semakin baik kinerja pengelolaan dana desa maka semakin transparan dan pertanggung jawaban yang diberikan. Sehingga pelaksanaan suatu kegiatan dapat menjangapi suatu tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini didukung dengan berbagai teori yang dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi transparansi dan tanggungjawab pengelolaan dana desa maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin baik juga. Begitupun sebaliknya, jika pengelolaan dana desa rendah maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa akan tidak baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh (Lara Aryanti, 2022) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas serta berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian sebagaimana telah dibahas dalam skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Poreang Kecamatan Tana Lili di Kabupaten Luwu Utara.
2. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Poreang Kecamatan Tana Lili di Kabupaten Luwu Utara.
3. Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Poreang Kecamatan Tana Lili di Kabupaten Luwu Utara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis dapat menambahkan variabel lain seperti sistem pelaporan dan kejelasan anggaran yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan dana desa. Hal ini diperuntukkan agar hasil dari penelitian berikutnya dapat digunakan secara lebih luas.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini kurang meluas. Diharapkan penelitian selanjutnya menambah populasi sampel yang ada di kecamatan tana lili agar diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrijal. 2018. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus).
- Arridlo, I. 2018. Transparansi Pelaporan Informasi Keuangan dan Non Keuangan dengan Internet Financial Reporting Berbasis pada Pemerintah Desa di Jawa Timur. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Amrullah, R. 2019. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah). *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang*. 3, 103–111.
- Amin, M. 2019. Pengaruh Kinerja dan Pengawasan Aparatur Pemerintah Desa terhadap Transparansi Keuangan Desa Montong Betok Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 4 (2): 71–80. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i2.762>
- Arfiansyah, M.A. 2019. Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
- _____. 2020. Pengaruh Sistem Keuangan Desa Pengendalian Interen Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal Of Islamic Finance and Accounting* 3 (1): 67–82.
- Arintowati, D. 2021. *Investigasi Akuntabilitas Akuntansi dalam perilaku berbudiyyaya (Bunga Rampai Penelitian Teman 8)*. Cetakan Pertama. Malang.
- Aryanti, L. 2022. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Ana, A.T.R., dan L.L. Ga. 2021. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus BUMdes Inahuk). *Jurnal Akuntansi* 9 (1): 62-72.
- Astuti, R.D. 2021. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desatamalate Kabupaten Takalar.

Skripsi. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Bawono, I.R., dan E. Setyadi. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Edisi Pertama. PT Grasindo. Jakarta.

Dewi, C.K., M. Ikbal, dan A.F. Moh. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. *Jurnal Pembangunan Daerah* 1 (2): 5–64.

Hulu, Y., R.H. Harahap, dan M.A. Nasution. 2018. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1): 146–154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis>.

Kurniawan, P.A. 2019. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dan Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Kurniawan, S.B. dan T. Wea. 2021. *Akuntabilitas Pengelolaan keuangan dana Desa dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Cetakan 1. MNC. Malang.

Lubis, A. 2020. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Serta Dampak Terhadap Kinerja Pemerintah di Kabupaten Deli. *Tesis*. Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui AkunTansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governace. *Jurnal Akuntansi Pemerin Tahan* 2 (1)

_____. 2018. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi III. ANDI (Anggota IKAPI). Yogyakarta.

_____. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi I. ANDI (Anggota IKAPI). Yogyakarta.

Nasution, D.A.D. 2018. Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal studi Akuntansi dan Keuangan*. 2 (3)

Ni'mah, U. 2019. faktor-faktor yang mempengaruhi perangkat desa dalam

pengelolaan keuangan desa (studi pada desa dikecamatan tahunan kabupaten jepara). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Islam Nhadlatul Ulama Jepara. Jepara.

Novatiani, A., R.W.R. Kusumah, dan D. P. Vabiani. 2019. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 10 (1): 51–61.

Nurkhasanah, I. 2019. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsurat). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Magelang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
Pengelolaan Keuangan Desa.

Putra, M.Y.D, dan N.K. Rasmini. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi* 28 (1): 32–158.

Raharjo, M.M. 2020. *Pengelolaan Dana Desa*. Cetakan pertama. PT Bumi Aksara. Jakarta Timur.

Setiawan, S. dan N, S. N. 2019. Pengaruh Transpransi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa. *Jurnal Prospek dan Tantangan Pengelolaan Keuangan desa* 3 (2252): 58–
66.<http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan Ke-14. Alfabeta. Bandung.

_____. 2016. *Metode Penelitian Kuantatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Suwarno. 2019. Pengelolaan Keuangan Dana Desa Perencanaan Sampai dengan Pertanggung Jawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas.

Jurnal Riset Akuntansi Perpajakan (JRAP) 6 (01): 25-38. <https://doi.org/10.35838/jra.p.v6i01.392>.

- Sweetenia, A.M., E.P.A. Caisari., A.F. Aprilia, dan A.H. Purwanti. 2019. Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Interen, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah desa. *Jurnal Analilis Bisnis Ekonomi* 17 (1): 44-56.
- Wisastawan, K.T., N.L.G.E. Sukindawati, dan N.P. Yasa. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa atas Pengelolaan Keuangan Desa Wisata. *Jurnal Riset Akuntansi* 19 (1): 18–27.
- Yanto, E., dan Aqfir. 2020. Pengaruh Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa The Influence of Transparency, Participation and Accountability on The Performance of Village Fundallocation Management and Village Fund. *Ekonomy Deposit Jurnal* 2 (2): 62-76.

